

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-NYA dapat terselesaikannya Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2024. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun ini disusun memuat uraian yang terdiri dari rencana sasaran, indikator sasaran, rencana capaian, program dan kegiatan yang pengelompokkannya berdasarkan urusan. Dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini diharapkan bisa diketahui target kinerja dari pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran sesuai dengan target yang ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2024 ini disusun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 25 Juli 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720505 199101 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan yang dibuat setiap tahun sebagai tindaklanjut telah ditetapkannya dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan atau biasa disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), penyusunan Renja PD tidak lepas dari peran stakeholder serta pemangku kepentingan dalam penyusunan serta beberapa tahapan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 16 ayat 2 yang dimulai dari tahapan :

- a. persiapan penyusunan.
- b. penyusunan rancangan awal.
 1. penyusunan dilakukan paling lambat minggu pertama bulan desember (N-2) dengan berpedoman pada Renstra PD dan Hasil Evaluasi Renja PD tahun lalu.
 2. penyempurnaan rancangan awal berpedoman pada Surat Edaran Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Daerah.
- c. penyusunan rancangan.
- d. pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah yang dilaksanakan paling lambat 2 minggu setelah Surat Edaran Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- e. perumusan rancangan akhir. dan
- f. penetapan yang dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan ditetapkan merupakan potret dari Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah yang telah disampaikan melalui berbagai tahapan dan telah dirumuskan untuk mendukung kebijakan kepala daerah, menampung usulan masyarakat dan stakeholder, selain itu Renja Perangkat Daerah yang disusun juga telah mengakomodir dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga sebagai bagian dari kewenangan serta tugas dan tupoksi Perangkat Daerah dan selanjutnya sebagai dasar penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah secara normatif memuat dasar hukum sesuai dengan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian/Lembaga terkait:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 ;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 ;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 ;
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
22. Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 ;
23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 ;
24. Peraturan Walikota Madiun Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah :

1. Memberikan gambaran kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022
2. Memberikan gambaran rencana Perangkat Daerah pada Tahun 2024
3. sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan program, kegiatan, sub kegiatan serta tolok ukur dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah

1. sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Perangkat Daerah yang mengedepankan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan pembangunan.
2. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai usulan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

1.4 Sistematika Penulisan

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sistematika penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sejauh mana keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan organisasi, selain itu mengidentifikasi faktor penghambat dan mencari solusi dalam pencapaian tujuan organisasi.

Evaluasi Pelaksanaan renja tahun lalu memberikan gambaran atau potret kinerja serta keselarasan dalam mencapai target kinerja perencanaan strategis.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020

Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja Program 2020		Tingkat Realisasi %	Catatan Analisis
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja		
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
Meningkatnya PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar		Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	91	92,12	101,23	Tercapai Melebihi Target
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang tertangani		99,9		
	Kegiatan Pembinaan Perintis Kemerdekaan atau Keluarganya, Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	Jumlah Janda Perintis yang mendapat bantuan		3		
	Kegiatan Pembinaan PSKS	Jumlah PSKS yang dibina dan aktif		4		
	Kegiatan Pendataan PMKS, PSKS, BPJS PBI dan SLRT	Jumlah dokumen data PMKS, PSKS, BPJS PBI yang tersedia		3		
	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan KPM PKH	Jumlah KPM PKH yang mendapat pembinaan dan pelatihan		2903		
	Kegiatan Pemantapan TAGANA	Jumlah TAGANA yang siap dalam penanganan bencana		23		
	Kegiatan Pemberdayaan Pelayanan Karang Werdha dan Kesejahteraan Lansia	Jumlah Layanan Karang Werda dan Lanjut usia		27		
	Kegiatan Sunat dan Nikah Masal	Jumlah Peserta Sunat dan Nikah Masal		0		
	Kegiatan Bantuan Fakir Miskin	Jumlah Fakir Miskin Penerima Manfaat		311		
	Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin	Jumlah kelompok Fakir Miskin yang mendapat bantuan		10		
	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100		
	Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		16		
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan		62		
	Program pemeliharaan barang milik daerah	Prosentase barang inventaris dalam kondisi baik		100		
	kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung dan bangunan	Jumlah gedung yang dipelihara		2		
	kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat		25		
	kegiatan pemeliharaan rutin / berkala sarana prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara		5		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu		100		
	kegiatan penyusunan perencanaan serta pelaporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu		9		
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan		Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	48,5	100	206,19	Tercapai Melebihi Target
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan		25,21		
	Kegiatan Evaluasi 10 Program Pokok PKK, Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Ibu	Jumlah Kelurahan yang mengikuti evaluasi		1		
	Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Perempuan	Jumlah pertemuan, pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan		10		
	Kegiatan Pemantapan Kelembagaan PUG	Jumlah peserta pemantapan PUG		295		
	Kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba, pencanangan, pembinaan serta pameran		27		
Meningkatnya penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak		Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	Tercapai Sesuai Target
	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan anak serta Rehabilitasi Sosial	Prosentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak		100		
	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang terlayani		100		
	Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Peserta Sosialisasi		40		
	Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu	Jumlah Peserta Sosialisasi		0		
	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah lembaga Fakom dan Panti Asuhan Anak yang Aktif		7		
	Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang tertangani		8094		

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022

Kode			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja (Renstra PD) akhir periode	Target dan Realisasi Kinerja Program								2021				2022					
						Target				Realisasi		Tingkat Realisasi	Catatan Analisis	Target		Realisasi		Tingkat Realisasi	Catatan Analisis				
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	(14)
1	06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																			
1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Percentase PSKS yang berperan aktif dalam Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	90	%	90	%	91,67	%	101,86	Tercapai Melebihi Target										
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Percentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	0	%								50	%	58,33	%	116,66	Tercapai Melebihi Target			
1	06	02	2.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang berpotensi untuk dikembangkan	7	lembaga	7	lembaga	7	lembaga	100	Tercapai Sesuai Target										
				Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Percentase PSKS yang dibina	66	%								50	%	58,33	%	116,66	Tercapai Melebihi Target			
1	06	02	2.03	01	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang mengikuti pelatihan/pembinaan untuk meningkatkan kemampuan	135	orang	135	orang	135	orang	100	Tercapai Sesuai Target									
					Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang terlatih	135	orang							135	orang	135	orang	100	Tercapai Sesuai Target			
1	06	02	2.03	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PMKS yang didampingi oleh TKS	80	orang	80	orang	178	orang	222,5	Tercapai Melebihi Target									
					Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Klien PMKS yang didampingi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	80	orang							80	orang	169	orang	211,25	Tercapai Melebihi Target			
1	06	02	2.03	03	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah siswa yang mengikuti sarasehan	0	orang	0	orang	0	orang	0	Tidak ada target									
					Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	1	lembaga							1	lembaga	1	lembaga	100	Tercapai Sesuai Target			
1	06	02	2.03	04	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Kelembagaan masyarakat yang mendapat pembinaan.	5	lembaga	5	Lembaga	5	Lembaga	100	Tercapai Sesuai Target	5	lembaga	5	lembaga	100	Tercapai Sesuai Target			
1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Percentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	18,7	%	18,7	%	4,78	%	25,56	Tidak Tercapai Target										
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Percentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100	%								100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target			
1	06	04	2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Percentase PMKS terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	90	%	90	%	100	%	111,11	Tercapai Melebihi Target										
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	Percentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	100	%								100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target			

Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tertangani															
1	06	04	2.01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS yang tercukupi kebutuhan pangannya	155	orang	155	orang	626	orang	403,87	Tercapai Melebihi Target							
					Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tercukupi kebutuhan pangannya	160	orang							160	orang	278	orang	173,75	Tercapai Melebihi Target	
1	06	04	2.01	02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS yang tercukupi kebutuhan Sandangnya	10	orang	10	orang	115	orang	1150	Tercapai Melebihi Target							
					Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tercukupi kebutuhan sandangnya	50	orang							50	orang	200	orang	400	Tercapai Melebihi Target	
1	06	04	2.01	03	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS yang memerlukan alat bantu	6	orang	6	orang	8	orang	133,33	Tercapai Melebihi Target							
					Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan alat bantu	9	orang							9	orang	10	orang	111,11	Tercapai Melebihi Target	
1	06	04	2.01	04	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS yang berhasil di reunifikasi	10	orang	10	orang	10	orang	100	Tercapai Sesuai Target							
					Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang menerima pelayanan reunifikasi keluarga	12	orang							12	orang	260	orang	2166,67	Tercapai Melebihi Target	
1	06	04	2.01	05	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan bimbingan fisik, mental,spiritual dan sosial	130	orang	130	orang	320	orang	246,15	Tercapai Melebihi Target							
					Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan bimbingan fisik, mental,spiritual dan sosial	60	orang							60	orang	130	orang	216,67	Tercapai Melebihi Target	
1	06	04	2.01	06	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah keluarga PMKS yang mendapatkan bimbingan sosial	250	orang	250	orang	218	orang	87,2	Tidak Tercapai Target							
					Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan bimbingan sosial	286	orang							286	orang	367	orang	128,32	Tercapai Melebihi Target	
1	06	04	2.01	10	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS yang terlayani	25	orang	25	orang	27	orang	108	Tercapai Melebihi Target							

					Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Geladangan dan Pengemis yang menerima layanan kedaruratan	40	orang							40	orang	41	orang	102,5	Tercapai Melebihi Target	
1	06	04	2.02		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Percentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	
1	06	04	2.02	02	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan layanan kedaruratan	15	orang	15	orang	24	orang	160	Tercapai Melebihi Target							
					Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan kedaruratan	15	orang							15	orang	36	orang	240	Tercapai Melebihi Target	
1	06	04	2.02	03	Sub Kegiatan Penyediaan Pernakanan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang tercukupi kebutuhan pangannya	150	orang							150	orang	200	orang	133,33	Tercapai Melebihi Target	
1	06	04	2.02	04	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS Lainnya yang tercukupi kebutuhan sandangnya	100	orang	100	orang	114	orang	114	Tercapai Melebihi Target							
					Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang tercukupi kebutuhan sandangnya	105	orang							105	orang	153	orang	145,71	Tercapai Melebihi Target	
1	06	04	2.02	05	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS yang memerlukan alat bantu	5	orang	5	orang	7	orang	140	Tercapai Melebihi Target							
					Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan alat bantu	7	orang							7	orang	45	orang	642,86	Tercapai Melebihi Target	
1	06	04	2.02	06	Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan perbekalan kesehatan	20	orang							20	orang	100	orang	500	Tercapai Melebihi Target	
1	06	04	2.02	07	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS Lainnya yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	10	orang	10	orang	21	orang	210	Tercapai Melebihi Target							
					Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	132	orang							132	orang	200	orang	151,52	Tercapai Melebihi Target	
1	06	04	2.02	12	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS yang berhasil di reunifikasi	10	orang	10	orang	5	orang	50	Tidak Tercapai Target							
					Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS	10	orang							10	orang	56	orang	560	Tercapai Melebihi Target	

						dan Napza di Luar Panti Sosial yang menerima pelayanan reunifikasi keluarga															
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN SOSIAL	PROGRAM JAMINAN SOSIAL	Percentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	90	%	90	%	100	%	111,11	Tercapai Melebihi Target	90	%	94,33	%	104,81	Tercapai Melebihi Target
1	06	05	2.01		Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	90	%	90	%	100	%	111,11	Tercapai Melebihi Target	90	%	12,12	%	13,47	Tidak Tercapai Target
1	06	05	2.01	01	Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Jumlah anak terlantar yang didata	24	orang	24	orang	11	orang	45,83	Tidak Tercapai Target	24	orang	12	orang	50	Tidak Tercapai Target
1	06	05	2.01	02	Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar		Jumlah anak terlantar yang di rujuk	24	orang	24	orang	1	orang	4,17	Tidak Tercapai Target	24	orang	12	orang	50	Tidak Tercapai Target
1	06	05	2.01	03	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah anak terlantar yang dipantau	24	orang	24	orang	11	orang	45,83	Tidak Tercapai Target	24	orang	12	orang	50	Tidak Tercapai Target
1	06	05	2.02		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target
1	06	05	2.02	01	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		jumlah Fakir miskin yang di data	14.042	orang	10.000	orang	10.000	orang	100	Tercapai Sesuai Target	14.042	orang	31031	orang	220,99	Tercapai Melebihi Target
1	06	05	2.02	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		jumlah kelurahan yang melaksanakan verval DTKS	27	Kelurahan	27	Kelurahan	27	Kelurahan	100	Tercapai Sesuai Target	27	kelurahan	27	kelurahan	100	Tercapai Sesuai Target
1	06	05	2.02	03	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial	3892	KK	3252	KK	3252	KK	100	Tercapai Sesuai Target	3892	KK	12,114	KK	311,25	Tercapai Melebihi Target
1	06	05	2.02	04	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah kelompok yang mendapat pembinaan pengembangan ekonomi	10	KUBE	10	KUBE	10	KUBE	100	Tercapai Sesuai Target	10	KUBE	10	KUBE	100	Tercapai Sesuai Target
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Percentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target
1	06	06	2.01		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota		Percentase Taruna siaga bencana yang handal	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target						
					Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota		Percentase Korban bencana yang mendapat bantuan	100	%							100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target
1	06	06	2.01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan		Jumlah Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan makanan	3300	orang	3300	orang	400	orang	12,12	Tidak Tercapai Target	3300	orang	17	orang	0,52	Tidak Tercapai Target
1	06	06	2.01	02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang		Jumlah Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan Sandang	1000	orang	1000	orang	0	orang	0	Tidak Tercapai Target	1000	orang	17	orang	1,70	Tidak Tercapai Target
1	06	06	2.01	05	Sub Kegiatan Pelayanan dukungan Psikososial		Jumlah Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan Psikososial	300	orang	300	orang	10	orang	3,33	Tidak Tercapai Target						
					Sub Kegiatan Pelayanan dukungan Psikososial		Jumlah Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan dukungan Psikososial	300	orang							300	orang	17	orang	5,67	Tidak Tercapai Target
1	06	06	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota		Percentase terbentuknya kelurahan tanggap bencana	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target						

					Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	Persentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana	100	%							100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	
1	06	06	2.02	01	Sub Kegiatan Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Peserta Yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana	60	orang	60	orang	60	orang	100	Tercapai Sesuai Target	60	orang	60	orang	100	Tercapai Sesuai Target	
1	06	06	2.02	02	Sub Kegiatan Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Pembinaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Tagana yang mendapatkan sosialisasi	20	orang	20	orang	20	orang	100	Tercapai Sesuai Target							
					Sub Kegiatan Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Pembinaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Tagana yang mendapatkan Pembinaan	26								26	orang	26,00	orang	100	Tercapai Sesuai Target	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target							
					PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	100	%							100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	
1	06	07	2.01		Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Jumlah lokasi taman makam pahlawan nasional yang dilakukan pemeliharaan	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target							
					Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	100	%							100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	
1	06	07	2.01	02	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Jumlah lokasi taman makam pahlawan yang dipelihara	1	makam	1	makam	1	makam	100	Tercapai Sesuai Target							
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Jumlah Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang tersedia dalam kondisi baik	1	paket							1	paket	1	paket	100	Tercapai Sesuai Target	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
2	08	02			PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	100	%	10	%	14,25	%	142,5	Tercapai Melebihi Target	15	%	11,15	%	74,33	Tidak Tercapai Target	
2	08	02	2.01		Kegiatan Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program yang di ARG	1	%	10	%	14,25	%	142,5	Tercapai Melebihi Target	15	%	60,16	%	401,07	Tercapai Melebihi Target	
2	08	02	2.01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah peserta pertemuan	100	orang	100	orang	100	orang	100	Tercapai Sesuai Target							
					Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen program yang di ARG	34	dokumen							34	dokumen	34	dokumen	100	Tercapai Sesuai Target	
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Rakor	350	orang	350	orang	195	orang	55,71	Tidak Tercapai Target							
					Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Rakor PUG	375	orang							375	orang	375	orang	100	Tercapai Sesuai Target	
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta review	68	orang	68	orang	68	orang	100	Tercapai Sesuai Target							
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peserta Pelatihan PPRG	70	orang							70	orang	70	orang	100	Tercapai Sesuai Target	

2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peserta Sosialisasi	100	orang	100	orang	100	orang	100	Tercapai Sesuai Target						
					Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peserta Sosialisasi PUG dan PPRG	75	orang							75	orang	160	orang	213,33	Tercapai Melebihi Target
2	08	02	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Partisipasi Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	92	%	92	%	92	%	100	Tercapai Sesuai Target						
2	08	02	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	32,5	%							12,5	%	13,45	%	107,6	Tercapai Melebihi Target
2	08	02	2.02	01	Sub Kegiatan sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta pertemuan monev P3EL dan UP2PKK	140	orang	140	orang	140	orang	100	Tercapai Sesuai Target						
					Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta Sosialisasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	180	orang							180	orang	180	orang	100	Tercapai Sesuai Target
2	08	02	2.02	02	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta Pelatihan	162	orang	162	orang	162	orang	100	Tercapai Sesuai Target						
					Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta Pelatihan peningkatan partisipasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	116	orang							116	orang	116	orang	100	Tercapai Sesuai Target
2	08	02	2.03		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan dan Swasta	48,34	%	48,34	%	48,34	%	100	Tercapai Sesuai Target						
2	08	02	2.03		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	60	%							50	%	75	%	150	Tercapai Melebihi Target
2	08	02	2.03	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pameran yang diikuti	1	pameran	1	pameran	0	pameran	0	Tidak Tercapai Target						
					Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mendapatkan pendampingan layanan pemberdayaan perempuan	15	lembaga							15	lembaga	15	lembaga	100	Tercapai Sesuai Target
2	08	02	2.03	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pertemuan forum/pembinaan	110	orang	110	orang	110	orang	100	Tercapai Sesuai Target						
					Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	80	orang							80	orang	80	orang	100	Tercapai Sesuai Target
2	08	02	2.03	03	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pertemuan	250	orang	250	orang	0	orang	0	Tidak Tercapai Target						

					Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pengembangan KIE	32	lembaga							32	lembaga	32	lembaga	100	Tercapai Sesuai Target
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Percentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	30	%	5	%	5	%	100	Tercapai Sesuai Target	10	%	16	%	160	Tercapai Melebihi Target
2	08	04	2.01		Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	100	%	70	%	70	%	100	Tercapai Sesuai Target	80	%	80	%	100	Tercapai Sesuai Target
2	08	04	2.01	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta review/pelatihan/lomba	81	orang	81	orang	81	orang	100	Tercapai Sesuai Target						
					Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pendampingan dan pelatihan data Kualitas Keluarga	111	orang							111	orang	192	orang	172,97	Tercapai Melebihi Target
2	08	04	2.01	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pertemuan	280	orang	280	orang	280	orang	100	Tercapai Sesuai Target						
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah RT yang memiliki data Kualitas Keluarga	108	RT							108	RT	162	RT	150	Tercapai Melebihi Target
2	08	04	2.01	03	SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KEWENANGAN KAB./KOTA	Jumlah peserta pelatihan	220	orang	220	orang	220	orang	100	Tercapai Sesuai Target						
					SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KEWENANGAN KAB./KOTA	Jumlah peserta pelatihan pengembangan dan peningkatan Kualitas Keluarga	81	orang							81	orang	192	orang	237,04	Tercapai Melebihi Target
2	08	04	2.02		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase kebijakan yang dapat mendukung terwujudnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target						
					Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase lembaga yang aktif dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak anak	100	%							100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target
2	08	04	2.02	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rakor	135	orang	135	orang	135	orang	100	Tercapai Sesuai Target						
					Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rakor peningkatan kualitas keluarga	100	orang							100	orang	192	orang	192	Tercapai Melebihi Target
2	08	04	2.02	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta studi tiru/jambore nasional	0	orang	0	orang	0	orang	0	Tidak ada target						

					Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga penyedia layanan peningkatan Kualitas Keluarga	14	lembaga							14	lembaga	14	lembaga	100	Tercapai Sesuai Target
2	08	04	2.02	03	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang mengikuti evaluasi 10 program pokok PKK	1	kelurahan	1	kelurahan	1	kelurahan	100	Tercapai Sesuai Target						
					Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pertemuan penguatan jejaring peningkatan kualitas keluarga	102	orang							102	orang	102	orang	100	Tercapai Sesuai Target
2	08	04	2.03		Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase kebijakan yang dapat mendukung terwujudnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target						
					Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase keluarga yang terlayani dalam peningkatan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	100	%							100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target
2	08	04	2.03	01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pertemuan	400	orang	400	orang	400	orang	400	Tercapai Melebihi Target						
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang terlayani dalam peningkatan Kesetaraan Gender dan perlindungan Anak	81	orang							81	orang	162	orang	200	Tercapai Melebihi Target
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Terpenuhinya Data terpilah gender dan anak	1	dokumen	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	1	dokumen	1	dokumen	100	Tercapai Sesuai Target
2	08	05	2.01		Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase gender dan anak yang terdata	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target						
					Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase pengumpulan data gender dan anak	100	%							100	%	100 %	%	100	Tercapai Sesuai Target
2	08	05	2.01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak dalam Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Rakor yang memahami dan melaksanakan data terpilah gender dan anak	50	orang	50	orang	50	orang	100	Tercapai Sesuai Target	65	orang	65	orang	100	Tercapai Sesuai Target
2	08	05	2.01	02	Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta monev dan rakor	50	orang	50	orang	50	orang	100	Tercapai Sesuai Target						
					Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rakor dan monev data gender dan anak	65	orang							65	orang	65	orang	100	Tercapai Sesuai Target
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Percentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target
2	08	03	2.01		Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Percentase pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target						

					Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	100	%							67,39	%	67,39	%	100	Tercapai Sesuai Target	
2	08	03	2.01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota	50	orang	9	orang	9	orang	100	Tercapai Sesuai Target	50	orang	50	orang	100	Tercapai Sesuai Target	
2	08	03	2.01	02	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30	orang	30	orang	30	orang	100	Tercapai Sesuai Target							
					Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	orang							50	orang	50	orang	100	Tercapai Sesuai Target	
2	08	03	2.02		Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan layanan bagi perempuan korban kekerasan	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target							
					Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase klien yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	56	%								56	%	52,9	%	94,46	Tidak Tercapai Target
2	08	03	2.02	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi dan sinkronisasi	40	orang	40	orang	40	orang	100	Tercapai Sesuai Target							
					Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi penyediaan layanan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	40	orang							40	orang	40	orang	100	Tercapai Sesuai Target	
2	08	03	2.03		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang terlayani kebutuhan spesifikasinya dalam situasi darurat	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target							
					Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	100	%								100	%	Rp 100	%	100	Tercapai Sesuai Target
2	08	03	2.03	03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik Bagi Perempuan Dalam Situasi Darurat Dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Klien Perempuan Yang Mendapatkan Pendampingan Dalam Situasi Darurat	29	klien	29	klien	29	klien	100	Tercapai Sesuai Target	20	klien	20	klien	100	Tercapai Sesuai Target	
2	08	03	2.03	04	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	30	orang	30	orang	30	orang	100	Tercapai Sesuai Target	30	orang	30	orang	100	Tercapai Sesuai Target	
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan pelembagaan dan penguatan pemenuhan hak anak	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target							
					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	42,2	%								12,5	%	15,21	%	121,68	Tercapai Melebihi Target
2	08	06	2.01		Kegiatan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah , Non Pemerintah Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pertemuan gugus tugas	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target							

					Kegiatan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah , Non Pemerintah Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak	38	%									12,55	%	15,21	%	121,20	Tercapai Melebihi Target
2	08	06	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi	140	orang	140	orang	140	orang	100	Tercapai Sesuai Target								
					Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi pemenuhan hak anak	100	orang									100	orang	100	orang	100	Tercapai Sesuai Target
2	08	06	2.02		Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target								
					Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	38	%									12,55	%	15,21	%	121,20	Tercapai Melebihi Target
2	08	06	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi/Sinkronisasi	30	orang	30	orang	30	orang	100	Tercapai Sesuai Target								
					Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan pernikahan dini	105	orang									105	orang	105	orang	100	Tercapai Sesuai Target
2	08	06	2.02	02	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang dibina	65	orang	65	orang	65	orang	100	Tercapai Sesuai Target								
					Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang didampingi dalam peningkatan kualitas hidup anak	67	orang									67	orang	67	orang	100	Tercapai Sesuai Target
2	08	06	2.02	03	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi ,Informasi Dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang tersedia	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	Tercapai Sesuai Target			1	dokumen	1	dokumen	100	Tercapai Sesuai Target
2	08	06	2.02	04	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi/Sinkronisasi	30	orang	30	orang	30	orang	100	Tercapai Sesuai Target								
					Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Sekolah Ramah Anak	90	orang									90	orang	90	orang	100	Tercapai Sesuai Target
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target								
					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	0,04	%									0,04	%	0,021 6	%	54	Tercapai Melebihi Target
2	08	07	2.01		Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target								
					Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sekolah yang terlibat dalam perlindungan Anak	69,5	%									40,74	%	43	%	105,55	Tercapai Melebihi Target

2	08	07	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah	40	sekolah	40	sekolah	40	sekolah	100	Tercapai Sesuai Target							
					Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah yang mendapatkan pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak	30	sekolah								30	sekolah	30	sekolah	100	Tercapai Sesuai Target
2	08	07	2.02		Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target							
					Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus	100	%								100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target
2	08	07	2.02	02	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah klien yang mendapatkan pendampingan dan memerlukan perlindungan khusus	8	orang	8	orang	8	orang	100	Tercapai Sesuai Target							
					Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendamping yang menangani Perlindungan anak	10	orang								10	orang	10	orang	100	Tercapai Sesuai Target
2	08	07	2.02	04	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi / bimbingan teknis	25	orang	25	orang	25	orang	100	Tercapai Sesuai Target							
					Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta pelatihan Konvensi Hak Anak	40	orang								40	orang	40	orang	100	Tercapai Sesuai Target
2	08	07	2.03		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedian Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah kabupaten /Kota	Persentase pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target							
					Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedian Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah kabupaten /Kota	Persentase Lembaga yang terlibat dalam perlindungan Khusus Anak	100	%								100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target
2	08	07	2.03	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1	dokumen								1	dokumen	1	dokumen	100	Tercapai Sesuai Target
2	08	07	2.03	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga/jejaring penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	20	orang	20	orang	20	orang	100	Tercapai Sesuai Target							
					Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi penyedia layanan perlindungan khusus anak	60	orang								60	orang	60	orang	100	Tercapai Sesuai Target

1	06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai	A	Nilai	A	Nilai	100	Tercapai Sesuai Target	A	Nilai	A	Nilai	100	Tercapai Sesuai Target	
1	06	01	2.01	Kegiatan Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	
1	06	01	2.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	20	dokumen	20	dokumen	20	dokumen	100	Tercapai Sesuai Target							
1	06	01	2.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen pengendalian perangkat daerah	20	dokumen								20	dokumen	20	dokumen	100	Tercapai Sesuai Target
1	06	02	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan daerah	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	
1	06	01	2.02	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Percentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target							
				Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Percentase pemenuhan gaji ASN Perangkat Daerah	100	%								100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target
1	06	01	2.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah										13	dokumen	13	dokumen	100	Tercapai Sesuai Target
1	06	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Perjanjian Kinerja ASN yang tercapai	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target							
1	06	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Pegawai yang mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan										100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target
1	06	01	2.05	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Percentase peserta yang paham	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target							
				Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Percentase peserta yang paham	100	%								100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target
1	06	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Pemenuhan dokumen administrasi umum	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	
1	06	01	2.06	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Percentase pemenuhan kebutuhan Perjalanan Dinas	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	
1	06	01	2.07	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Percentase tercukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur pemerintah	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	
1	06	01	2.07	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Percentase pemenuhan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	
1	06	01	2.07	Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Percentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	
1	06	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	
1	06	01	2.08	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Percentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	

1	06	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase pemuatan kebutuhan gaji non ASN perangkat daerah	100	%								100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target
1	06	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	
1	06	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas / jabatan yang layak digunakan	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	
1	06	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	
1	06	01	2.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	100	%	100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target							
					Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Persentase sarana prasarana yang layak digunakan	100	%							100	%	100	%	100	Tercapai Sesuai Target	

Berdasarkan tabel capaian kinerja renstra diatas terdapat beberapa kondisi yang menggambarkan situasi serta kondisi yang mempengaruhi pencapaian Perangkat Daerah yaitu :

1. Realisasi Kinerja Tahun 2020 semuanya memenuhi target kinerja yang direncanakan bahkan ada yang melampaui target kinerja.
2. Realisasi Kinerja Tahun 2021 terdapat 1 Program dan 12 Sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja dikarenakan adanya efek pandemi Covid 19.
3. Realisasi Kinerja Tahun 2021 terdapat 8 Program, 27 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan yang yang sesuai dengan target kinerja yang direncanakan.
4. Realisasi Kinerja Tahun 2021 terdapat 3 Program, 4 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan.
5. Realisasi Kinerja Tahun 2022 terdapat 1 Program yang tidak memenuhi target kinerja dikarenakan adanya efek dari pandemi Covid 19.
6. Realisasi Kinerja Tahun 2022 terdapat 6 Program, 23 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan yang yang sesuai dengan target kinerja yang direncanakan.
7. Realisasi Kinerja Tahun 2022 terdapat 5 Program, 7 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan.
8. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya/tidak memenuhi target kinerja di tahun anggaran berikutnya adalah dengan meningkatkan kinerja, penambahan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun merupakan Perangkat Daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 dan selanjutnya ditindaklnjuti dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
- b. Unsur Pembantu : Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Unsur Pelaksana:
 1. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional ;
 2. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional ;

3. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
 4. Bidang Sosial, Penanganan Bencana Dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, terdiri atas Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. UPTD ; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi masing-masing dari susunan organisasi sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas, kepala dinas mempunyai fungsi :

1. penyusunan rumusan kebijakan teknis di lingkup kesekretariatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
3. penyelenggaraan pembinaan di lingkup kesekretariatan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
4. pelaksanaan pengoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian, dan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ;

- b. pengoordinasian penyusunan program kegiatan, pelayanan administratif dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu ;
- c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan ;
- d. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, dan kearsipan di lingkungan Dinas ;
- e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas ;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas ;
- g. penyusunan rencana program pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan Dinas ;
- h. penyusunan rencana program pelaksanaan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan Dinas ; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :
 - a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b) melakukan urusan surat-menurut dan tata kearsipan ;
 - c) melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor ;
 - d) melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas ;
 - e) melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - f) menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas ;
 - g) menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan dinas ;
 - h) menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan dinas ; dan
 - i) melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Sub Koordinator Perencanaan :
 - a) melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan ;
 - b) melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas ;
 - c) mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD dan perubahannya di lingkungan Dinas ; dan
 - d) melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Sub Koordinator Keuangan yang mempunyai tugas :

- a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Keuangan ;
- b) melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
- c) melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai ;
- d) mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas ; dan
- e) melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga dan pengelolaan data gender. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
2. pelaksanaan kebijakan teknis dan kerjasama pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ;

3. pelaksanaan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
4. pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan program pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

1. Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman, dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - h. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;

- i. melakukan sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- j. melakukan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- k. melakukan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- l. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- m. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- n. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- o. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- p. melakukan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- q. melakukan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita/Gender, lembaga penelitian dan pengembangan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- r. melakukan fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

2. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
 - b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
 - c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
 - d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
 - f. melakukan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
 - g. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
 - h. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
 - i. melakukan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
 - j. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
 - k. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
 - l. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;

- m. melakukan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
 - n. melakukan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
 - o. melakukan penyediaan layanan komprehensif dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
 - p. mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga; dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.
3. Sub Koordinator Pengelolaan Data Gender mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender;
 - b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender;
 - c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender;
 - d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender;
 - f. melakukan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender;
 - g. melakukan penyediaan data gender dan anak dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender;
 - h. melakukan penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak ;
2. pelaksanaan kebijakan teknis dan kerjasama pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak ;
3. pelaksanaan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak ;
4. pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak ;
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan program pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak ; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak terdiri dari :

1. Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;

- d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- f. melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- h. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- i. melakukan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- j. melakukan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- k. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- l. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- m. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- n. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;

- o. melakukan penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- p. melakukan penguatan jejaring antarlembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- q. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- r. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- s. melakukan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- t. melakukan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- u. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- v. melakukan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- w. melakukan penguatan jejaring antarlembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- x. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- y. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- z. melakukan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;

- aa. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak; dan
 - bb. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak.
2. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
 - b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
 - c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
 - d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
 - f. melakukan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
 - g. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, media dan dunia usaha dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
 - h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
 - i. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
 - j. melakukan penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak dalam rangka pemenuhan hak anak;
 - k. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;

- i. melakukan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
 - m. melakukan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
 - n. melakukan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak; dan
 - a) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak.
- e. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, tuna sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Rehabilitasi Sosial ;
2. pelaksanaan kebijakan teknis dan kerjasama pada Bidang Rehabilitasi Sosial ;
3. pelaksanaan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi pada Bidang Rehabilitasi Sosial ;
4. pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi pada Bidang Rehabilitasi Sosial ;
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan program pada Bidang Rehabilitasi Sosial ; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

1. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lansia Terlantar serta Gelandangan Pengemis mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;

- b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
- c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
- d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
- f. melakukan penyediaan permakanan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
- g. melakukan penyediaan sandang dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
- h. melakukan penyediaan alat bantu dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
- i. melakukan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
- j. melakukan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
- k. melakukan penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
- l. melakukan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;

- m. melakukan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
 - n. melakukan pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
 - o. melakukan pemberian layanan data dan pengaduan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
 - p. melakukan pemberian layanan kedaruratan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
 - q. melakukan pemberian pelayanan penelusuran keluarga dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
 - r. melakukan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
 - s. melakukan pemberian layanan rujukan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
 - t. melakukan fasilitasi akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti; dan
 - u. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.
2. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
 - b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
 - c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;

- d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
- f. melakukan pemberian layanan data dan pengaduan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
- g. melakukan pemberian layanan kedaruratan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
- h. melakukan penyediaan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya meliputi:
 - 1) pangan;
 - 2) sandang;
 - 3) alat bantu;
 - 4) perbekalan kesehatan di luar panti.
- i. melakukan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
- j. melakukan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
- k. melakukan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
- l. melakukan pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
- m. melakukan pemberian pelayanan penelusuran keluarga dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;

- n. melakukan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
 - o. melakukan pemberian layanan rujukan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
 - p. melakukan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
 - q. melakukan fasilitasi akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
 - r. melakukan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi ke Daerah untuk dipulangkan ke kelurahan asal; dan
 - s. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.
- f. Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, dan penanganan bencana dan pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis dan kerjasama pada Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi pada Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ;
 - d. pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi pada Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan program pada Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ; dan

- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan terdiri dari :

1. Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman, dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
 - b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
 - c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
 - d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
 - f. melakukan fasilitasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
 - g. melakukan peningkatan kapasitas dan pendampingan komunitas adat terpencil dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
 - h. melakukan pengumpulan sumbangan dalam Daerah dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
 - i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
 - j. melakukan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
 - k. melakukan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
 - l. melakukan peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
 - m. melakukan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;

- n. melakukan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
 - o. melakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
 - p. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar kepahlawanan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
 - q. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi penggalian potensi nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
 - r. melaksanakan bahan pembinaan, pengawasan dan saksi pelaksanaan undian tingkat daerah dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
 - s. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial; dan
 - t. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
2. Sub koordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman, dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
 - b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
 - c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
 - d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;

- e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
 - f. melakukan penjangkauan anak-anak terlantar dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
 - g. melakukan rujukan anak-anak terlantar dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
 - h. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
 - i. melakukan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
 - j. melakukan pendataan fakir miskin cakupan daerah dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
 - k. melakukan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
 - l. melakukan fasilitasi pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia;
 - m. melakukan fasilitasi pengangkatan anak oleh orang tua tunggal; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
3. Sub koordinator Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman, dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan;
 - b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan;
 - c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan;

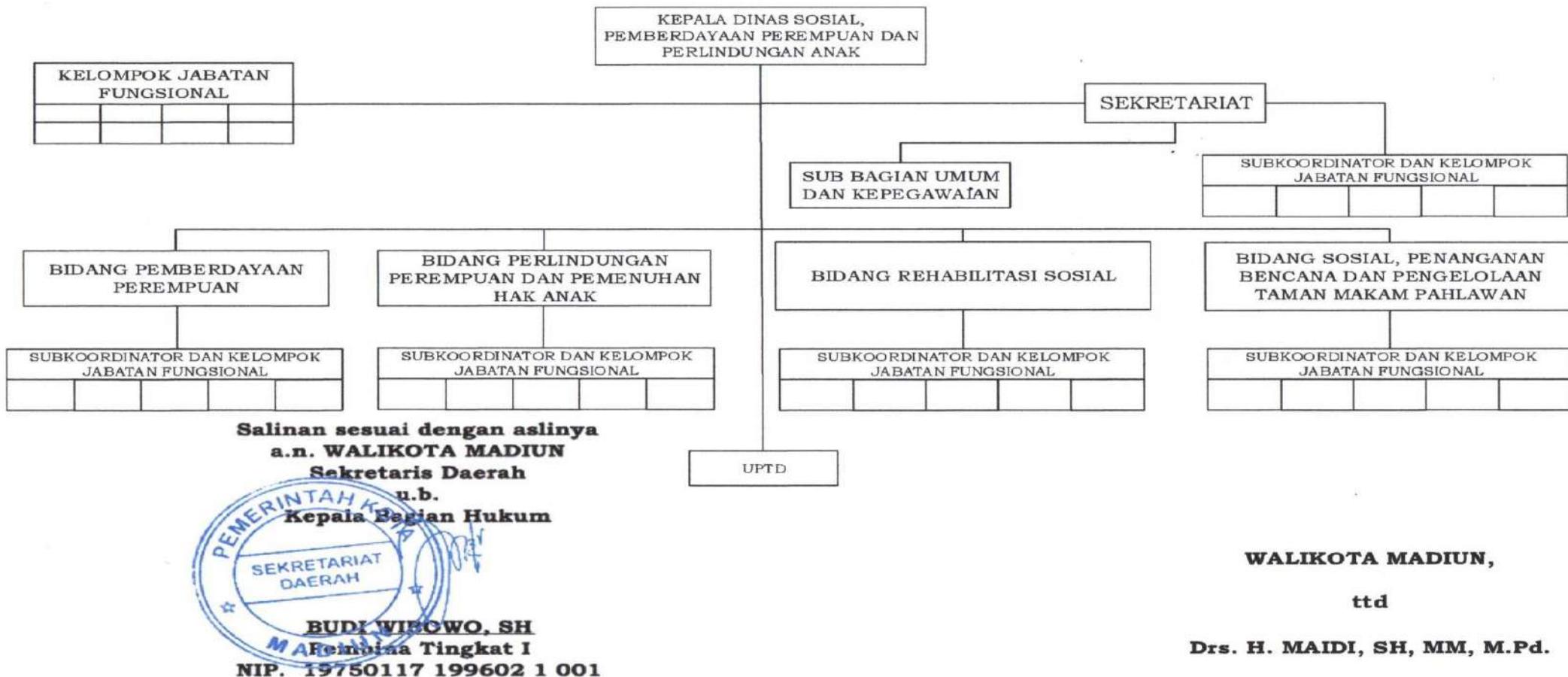
- d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan;
 - f. melakukan penyediaan sandang, pangan, dan tempat penampungan pengungsi dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana;
 - g. melakukan penanganan khusus bagi kelompok rentan dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana;
 - h. melakukan pelayanan dukungan psikososial dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana;
 - i. melakukan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana;
 - j. melakukan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana;
 - k. melakukan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana;
 - l. melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional dalam rangka pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan;
 - m. melakukan pemeliharaan dan pengamanan taman makam pahlawan nasional dalam rangka pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan;
 - n. melakukan koordinasi terkait pemakaman di taman makam pahlawan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
- g. UPTD mempunyai tugas :
- 1. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu ;
 - 2. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

h. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 67 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Desember 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMERINTAHAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Jenis Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

1. Standar Pelayanan Pengaduan;
2. Standar Pelayanan Pengusulan KIS PBIN;
3. Standar Pelayanan Penonaktifan KIS PBIN;
4. Standar Pelayanan Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar/ Kartu Indonesia Pintar Kuliah;
5. Standar Pelayanan Pengusulan Data Kemiskinan;
6. Standar Pelayanan Orang Terlantar;
7. Standar Pelayanan Surat Tanda Pendaftaran ORSOS/Yayasan;
8. Standar Pelayanan Surat Tanda Pendaftaran Ulang ORSOS/Yayasan;
9. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Adopsi Anak dari Keluarga;
10. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Adopsi Anak dari Panti Asuhan;
11. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Tugas Pendampingan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
12. Standar Pelayanan Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Geladangan Psikotik dan Tempat Tinggal Tidak Tetap;
13. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah;
14. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan dipergunakan didalam Wilayah Kota Madiun;
15. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Usulan Gelar Perintis Kemerdekaan;
16. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Gelar Pahlawan;
17. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pelayanan Lansia Terlantar;
18. Standar Pelayanan Penanganan Bencana Sosial;
19. Standar Pelayanan Penanganan Bencana Alam;
20. Standar Pelayanan Program Keluarga Harapan; dan
21. Standar Pelayanan Santunan Kematian.

Indikator yang menjadi Tolok ukur perangkat daerah yang tertuang dalam renstra perangkat daerah meliputi :

1. Tujuan Perangkat Daerah

1. terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar PMKS dengan indikator Persentase PMKS yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar minimal dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{PMKS yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar minimal}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100\%$$

2. terwujudnya pemenuhan dan perlindungan hak anak serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan rumus perhitungan mengacu dari hasil survei Badan Pusat Statistik

2. Sasaran Perangkat Daerah

- a. meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial PMKS dengan indikator Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial}}{\text{Jumlah PMKS yang memerlukan perlindungan dan jaminan sosial}} \times 100\%$$

- b. meningkatnya pemberdayaan sosial PSKS dengan indikator Persentase PSKS yang diberdayakan dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{PSKS yang diberdayakan}}{\text{Jumlah PSKS}} \times 100\%$$

- c. meningkatnya rehabilitasi sosial PMKS dengan indikator Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{PMKS yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial}}{\text{Jumlah PMKS yang memerlukan penanganan rehabilitasi sosial}} \times 100\%$$

- d. meningkatnya meningkatnya perempuan yang berdaya terdapat 2 (dua) indikator yaitu :

1. Persentase perempuan sebagai pengambil keputusan dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase perempuan sebagai pengambil keputusan (manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan Teknisi)}}{\text{Jumlah Perempuan Usia Produktif (15-64 Tahun)}} \times 100\%$$

2. meningkatnya tata kelola pengarusutamaan gender dengan indikator persentase keluarga yang berkualitas dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah keluarga yang berkualitas}}{\text{jumlah keluarga yang di data melalui survey}} \times 100\%$$

- e. meningkatnya penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dengan indikator Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kasus pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus pengaduan}} \times 100\%$$

- f) meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak anak dengan indikator Prevalensi kekerasan terhadap anak dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah kasus kekerasan terhadap anak}}{\text{Jumlah anak usia 13 sampai 17 tahun}}$$

- g) Indeks Reformasi Birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

3. Program

- a. Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator Persentase PSKS yang berperan aktif dalam pemberdayaan sosial dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah PSKS yang berperan aktif dalam pemberdayaan sosial}}{\text{Jumlah PSKS}} \times 100\%$$

- b. Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah PMKS mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial}}{\text{Jumlah PMKS memerlukan pelayanan rehabilitasi sosial}} \times 100\%$$

- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah PMKS mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100\%$$

- d. Program Penanganan Bencana dengan indikator Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah korban bencana mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial}}{\text{Jumlah korban bencana}} \times 100\%$$

- e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah Taman Makam Pahlawan}} \times 100\%$$

- f. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Anggaran APBD yang diusulkan ARG}}{\text{Jumlah Anggaran APBD yang di ARG}} \times 100\%$$

- g. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan indikator Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah RT yang memiliki data keluarga berkualitas}}{\text{Jumlah RT}} \times 100\%$$

- h. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan indikator Terpenuhinya Data terpilah gender dan anak

- i. Program Perlindungan Perempuan dengan indikator Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Jumlah pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani

X 100%

Jumlah pengaduan tindak kekerasan

- j. Program Pemenuhan Hak Anak dengan indikator Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak

X 100%

Jumlah Lembaga

- k. Program Perlindungan Khusus Anak dengan indikator Persentase kasus kekerasan terhadap anak dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak

X 100%

Jumlah Anak sampai dengan usia 18 tahun

- l. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai Evaluasi implementasi AKIP Perangkat Daerah

4. Standar Pelayanan Minimal

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti dengan indikator Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dengan indikator Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti dengan indikator Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dengan indikator Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota dengan indikator Jumlah warga negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah
- a. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dengan rumus perhitungan sebagai berikut :
- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
_____ X 100%
- Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis
- b. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dengan rumus perhitungan sebagai berikut :
- Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran
_____ X 100%
- populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota
- c. Persentase ARG pada belanja langsung APBD dengan rumus perhitungan sebagai berikut :
- Jumlah ARG pada belanja langsung APBD
_____ X 100%
- Jumlah seluruh belanja langsung di APBD
- d. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota dengan rumus perhitungan sebagai berikut :
- Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi
_____ X 100%
- Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun)
- e. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) dengan rumus perhitungan sebagai berikut :
- Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan
_____ X 100%
- Jumlah penduduk perempuan

PENCAPAIAN KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN TAHUN 2021-2024

NO	SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
							2021		2022		2023		2024		Catatan Analisis
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Proyeksi Realisasi	Target	Proyeksi Realisasi	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti					Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	107,53%	95	100	97	100	100	100	Tercapai Melebihi Target
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti					Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	137,42%	460	737	465	737	470	737	Tercapai Melebihi Target
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti					Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	204,44%	137	213	139	213	140	213	Tercapai Melebihi Target
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti					Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	92	72	94	94	96	96	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota					Jumlah warga negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	173,76%	36	17	36	16	36	15	Tercapai (Indikator Negatif)
6		Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS				Percentase PMKS yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar minimal	91%	91,07%	92%	94,33%	93%	94%	94%	94%	Tercapai Melebihi Target

7			Meningkatnya PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal			Percentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	91%	91,07%	-	-	-	-	-	-	-	-
8			meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial PMKS			Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	-	-	93%	94,33%	94%	95%	95%	95%	95%	Tercapai Melebihi Target
9			meningkatnya pemberdayaan sosial PSKS			Prosentase PMKS yang diberdayakan	-	-	90%	91%	91%	91%	92%	92%	92%	Tercapai Melebihi Target
10			meningkatnya rehabilitasi sosial PMKS			Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	-	-	19%	21,31%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai Melebihi Target
11			Program Pemberdayaan Sosial			Percentase PSKS yang berperan aktif dalam Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	90%	92%	-	-	-	-	-	-	-	
12			Program Pemberdayaan Sosial			Percentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	-	-	50%	58,33%	58%	60%	66%	66%	66%	Tercapai Melebihi Target
13			Program Rehabilitasi Sosial			Percentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	18,7 %	4,78%	-	-	-	-	-	-	-	
14			Program Rehabilitasi Sosial			Percentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
15			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			Percentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	90%	99,66%	90%	94,33%	91%	95%	91%	95%	95%	Tercapai Melebihi Target
16			Program Penanganan Bencana			Percentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

17				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Percentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Percentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
19		terwujudnya pemenuhan dan perlindungan hak anak serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan				Rasio KDRT	0,02	0,009	0,02	0,008	-	-	-	-	-	-	Tercapai Melebihi Target (Indikator Negatif)
						Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,18	76,75	77,18		77,20	77,20	77,22	77,22	77,22	77,22	Belum ada Update Data dari BPS
20			Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender			Indeks Pemberdayaan gender	77,07	76,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
21			Meningkatnya tata kelola pengarusutamaan gender			Percentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	Tercapai
22						Percentase keluarga yang berkualitas	-	-	-	-	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
23						persentase perempuan sebagai pengambil keputusan	-	-	-	-	25%	25%	25,01 %				
24			Meningkatnya perempuan yang berdaya/delete			Percentase keluarga yang berkualitas			6%	7,6%	-	-	-	-	-	-	Tercapai Melebihi Target
25						Prosentase partisipasi perempuan lembaga pemerintahan di	12,78 %		13%		-	-	-	-	-	-	

26				Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Percentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	10%	14,25%	15%	11,15%	-	-	-	-	Tidak Tercapai
27				Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Percentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	5%	5%	10%	15,7%	20%		30%		Tercapai Melebihi Target
28				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		Terpenuhinya Data terpisah gender dan anak	100%	100%	1 dokumen	Tercapai					
29				Program Perlindungan Perempuan		Percentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
30				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Percentase peningkatan pelembagaan dan penguatan pemenuhan hak anak	100%	100%	-	-	-	-	-	-	
31				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Percentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	-	-	12,50 %	15,21%	22,43 %		42,20 %		Tercapai Melebihi Target
32				Program Perlindungan Khusus Anak		Percentase pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak	100%	100%	-	-	-	-	-	-	
33				Program Perlindungan Khusus Anak		Percentase kasus kekerasan terhadap anak	-	-	0,04 %	0,0216%	0,04%		0,04%		Tercapai Melebihi Target
34			Meningkatnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	23	22,62	23	16,95	23		24		Tidak Tercapai

35				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	A	A	
36					Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100%	64,88%	100%	87%	100%		100%		Tidak Tercapai
37					Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
38					Persentase ARG pada belanja langsung APBD		10%	14,25%	15%	11,15%	20%		30%		Tidak Tercapai
39					Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota		0,003 %	0,004%	0,003 %	0,0216%	0,003 %		0,002 %		Tercapai Melebihi Target
40					Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)			8,74		6,80					

Dilihat berdasarkan tabel capaian kinerja pelayanan diatas terdapat beberapa kondisi yang menggambarkan situasi serta kondisi yang mempengaruhi pencapaian Perangkat Daerah yaitu :

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT KINERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN
TAHUN 2021-2024

NO	SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD	Indikator	Faktor Pendorong atau Kebijakan yang mempengaruhi	Faktor Penghambat atau Kebijakan yang mempengaruhi
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti					Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti					Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti					Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti					Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota					Jumlah warga negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
	Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS					Persentase PMKS yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar minimal	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai

		Meningkatnya PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal			Persentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
		meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial PMKS			Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
		meningkatnya pemberdayaan sosial PSKS			Prosentase PMKS yang diberdayakan	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
		meningkatnya rehabilitasi sosial PMKS			Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
		Program Pemberdayaan Sosial			Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
		Program Pemberdayaan Sosial			Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
		Program Rehabilitasi Sosial			Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
		Program Rehabilitasi Sosial			Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
		Program Penanganan Bencana			Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
	terwujudnya pemenuhan dan perlindungan hak				Rasio KDRT	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai

	anak serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
		Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender			Indeks Pemberdayaan gender	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
		Meningkatnya tata kelola pengarusutamaan gender			Persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
					Persentase keluarga yang berkualitas	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
					persentase perempuan sebagai pengambil keputusan	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
		Meningkatnya perempuan yang berdaya/delete			Persentase keluarga yang berkualitas	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
					Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
			Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		Terpenuhinya Data terpisah gender dan anak	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
			Program Perlindungan Perempuan		Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Persentase peningkatan pelembagaan dan penguatan pemenuhan hak anak	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai

			Program Perlindungan Khusus Anak		Persentase pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
			Program Perlindungan Khusus Anak		Persentase kasus kekerasan terhadap anak	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
		Meningkatnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
				Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
				Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
				Persentase ARG pada belanja langsung APBD		Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
				Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota		Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai
				Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		Ketersediaan anggaran	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan hasil Indeks Kepuasan masyarakat pada Perangkat Daerah Tahun sebelumnya mendapatkan nilai indeks **85,008** dengan kriteria **baik**.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menangani 2 (dua) urusan wajib yaitu Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di bidang sosial diarahkan untuk penanganan dan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS. Dengan meningkatnya penanganan dan pelayanan terhadap PMKS/PPKS diharapkan dapat meningkatkan jumlah PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pemberdayaan Perempuan di Kota Madiun diarahkan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi bagi perempuan yang berdaya saing berbasis potensi lokal dan dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan melalui lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta serta organisasi-organisasi kewanitaan dengan pelatihan-pelatihan keterampilan.

Perlindungan Perempuan dan Anak diarahkan untuk meningkatkan komitmen dan kemampuan Pemerintah Kota Madiun dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak dengan sasaran meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan pelayanan yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan Urusan Sosial adalah sebagai berikut:
 1. meningkatnya angka PMKS khususnya fakir miskin;
 2. masih adanya PMKS yang belum tertangani atau memperoleh perlindungan sosial;
 3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang setiap saat dapat berubah;
 4. masih ada tenaga Pekerja Sosial Masyarakat yang kompeten di masing-masing kelurahan;

5. terbatasnya daya tampung panti milik Propinsi Jawa Timur; dan
 6. masih terdapat sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan dan pelayanan PMKS;
- b. Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:
1. masih ada pengaduan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak;
 2. Kurang optimalnya kerjasama dan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 3. Kurangnya partisipasi perempuan di kelembagaan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga legislatif;
 4. kurangnya kemampuan perempuan dalam mendukung ekonomi keluarga; dan
 5. masih kurangnya sarana dan prasarana publik yang responsif gender.

Sedangkan hambatan yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun adalah jumlah Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai.

Dengan masih terdapatnya permasalahan tersebut maka pencapaian terhadap Visi, Misi Kepala Daerah dan Capaian Program Nasional (SPM, SDGs) akan terhambat juga. Permasalahan sebagaimana tersebut diatas akan ditindaklanjuti pada kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dalam menentukan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas sebagai berikut :

- a. terbatasnya daya tampung panti milik Propinsi Jawa Timur ;
- b. meningkatnya angka PMKS khususnya fakir miskin;
- c. tingkat partisipasi dan keterwakilan perempuan di Legislatif yang masih rendah ; dan
- d. masih terdapatnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kasus Perempuan dan Anak.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD merupakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang diambil dari Renstra Perangkat daerah pada Tahun Berkala. Oleh karena itu perlu dilakukan analisa kebutuhan didasarkan pada evaluasi kinerja Perangkat Daerah, analisa kinerja pelayanan dan identifikasi isu-isu penting yang telah dibagangkan dalam bentuk Pohon Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum di dalam aplikasi <https://kak.madiunkota.go.id>.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan									
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					39.012.529.406,00	34.862.529.406,00			
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					35.398.203.403,00	31.749.088.603,00			
1 06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					35.398.203.403,00	31.749.088.603,00			
1 06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.914.460.444,00	8.625.032.816,00			
1 06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					528.383.950,00	266.283.950,00			
1 06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
				Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A nilai	4 Dokumen	100 %			
1 06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					129.757.550,00	129.757.550,00			
				Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A nilai	4 Laporan	100 %			
1 06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					24.684.200,00	24.684.200,00			
				Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A nilai	2 Laporan	100 %			
1 06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					373.942.200,00	111.842.200,00			
1 06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.380.293.089,00	5.979.126.761,00			
				Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan daerah	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A Nilai	35 Orang/bulan	100 %			
1 06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD					6.234.914.489,00	5.833.748.161,00			
				Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan daerah	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A Nilai	13 Laporan	100 %			
1 06	01	2.05		Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah					145.378.600,00	145.378.600,00			
1 06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					100.439.400,00	98.278.000,00			
				Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pegawai yang mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	- Kota Madiun, Taman, Taman	A Nilai	58 Orang	100 %			
1 06	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					54.892.600,00	54.376.000,00			
				Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pegawai yang mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	- Kota Madiun, Taman, Taman	A Nilai	58 Orang	100 %			
1 06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					45.546.800,00	43.902.000,00			
1 06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					475.630.000,00	475.630.000,00			
				Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan dokumen administrasi umum	- Kota Madiun, Taman, Taman	A Nilai	60 Laporan	100 %			
1 06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					475.630.000,00	475.630.000,00			
1 06	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					583.685.880,00	100.095.070,00			
				Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase tercukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur pemerintah	- Kota Madiun, Taman, Taman	A Nilai	0 Unit	100 %			
1 06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					100.800.000,00	0,00			

					Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase tercukupinya kebutuhan sarana prasarana apparatur pemerintah	- Kota Madiun, Taman, Taman	A Nilai	0 Unit	100 %	383.890.810,00	0,00		
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
					Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase tercukupinya kebutuhan sarana prasarana apparatur pemerintah	- Kota Madiun, Taman, Taman	A Nilai	110 Unit	100 %	98.995.070,00	100.095.070,00		
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.339.057.830,00	1.198.648.740,00	
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
					Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	- Kota Madiun, Taman, Taman	A Nilai	12 Laporan	100 %	1.023.757.830,00	883.348.740,00		
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
					Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	- Kota Madiun, Taman, Taman	A Nilai	12 Laporan	100 %	315.300.000,00	315.300.000,00		
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								506.970.295,00	506.970.295,00	
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
					Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	- Kota Madiun, Taman, Taman	A Nilai	6 Unit	100 %	233.514.500,00	233.514.500,00		
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
					Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	- Kota Madiun, Taman, Taman	A Nilai	2 Unit	100 %	182.421.075,00	182.421.075,00		
1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
					Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	- Kota Madiun, Taman, Taman	A Nilai	110 Unit	100 %	91.034.720,00	91.034.720,00		
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								4.561.962.150,00	4.351.382.713,00	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								4.561.962.150,00	4.351.382.713,00	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota										
					Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dibina	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66 %	214 Orang	66 %	766.785.700,00	682.439.273,00		
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota										
					Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dibina	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66 %	3 Orang	66 %	59.878.400,00	53.291.776,00		
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota										
					Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dibina	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66 %	5 Keluarga	66 %	420.856.400,00	370.112.196,00		
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota										
					Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dibina	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66 %	14 Lembaga	66 %	3.314.441.650,00	3.245.539.468,00		
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								5.039.749.864,00	4.534.633.481,00	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								4.377.960.541,00	3.944.103.151,00	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan										
					Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	170 Orang	100 %	210.640.000,00	170.896.000,00		
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang										

					Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	63 Orang	100 %	25.768.681,00	15.332.431,00		
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu										
					Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	8 Orang	100 %	59.692.000,00	26.308.000,00		
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga										
					Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	8 Orang	100 %	42.300.000,00	22.560.000,00		
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial										
					Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	30 Orang	100 %	20.600.000,00	9.500.000,00		
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat										
					Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	280 Orang	100 %	3.709.472.860,00	3.627.186.820,00		
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan										
					Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Orang	100 %	309.487.000,00	72.319.900,00		
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								661.789.323,00	590.530.330,00	
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan										
					Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	35 Orang	100 %	253.589.605,00	209.180.500,00		
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan										
					Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	160 Orang	100 %	145.587.500,00	86.366.000,00		
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang										
					Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	105 Orang	100 %	51.700.717,00	42.790.000,00		
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu										
					Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Orang	100 %	20.268.500,00	20.242.000,00		
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti										

					Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	85 Orang	100 %	29.426.001,00	25.311.830,00	
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	160 Orang	100 %	14.100.000,00	73.800.000,00
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	75 Orang	100 %	118.917.000,00	121.560.000,00
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	15 Orang	100 %	28.200.000,00	11.280.000,00
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								14.912.918.900,00	13.234.529.873,00
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar								8.668.000,00	7.714.520,00
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 91 %	8 Orang	95 %	3.960.000,00	3.524.400,00
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 91 %	4 Orang	95 %	4.488.000,00	3.994.320,00
1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 91 %	4 Orang	95 %	220.000,00	195.800,00
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								14.904.250.900,00	13.226.815.353,00
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91 %	24685 Orang	100 %	1.182.942.800,00	1.052.819.092,00
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91 %	4000 Keluarga	100 %	645.005.500,00	574.054.895,00
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91 %	4000 Keluarga	100 %	12.733.026.000,00	11.294.425.192,00
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91 %	40 Orang	100 %	343.276.600,00	305.516.174,00
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA								786.861.365,00	841.306.615,00

1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								79.870.965,00	71.085.159,00
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan									
					Percentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Korban bencana yang mendapat bantuan	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	17 Orang	100 %	39.293.665,00	34.971.362,00	
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang								15.177.300,00	13.507.797,00
					Percentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Korban bencana yang mendapat bantuan	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	17 Orang	100 %			
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial								25.400.000,00	22.606.000,00
					Percentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Korban bencana yang mendapat bantuan	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	17 Orang	100 %			
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								706.990.400,00	770.221.456,00
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana									
					Percentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Kampung	100 %	180.787.200,00	160.900.608,00	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana									
					Percentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	26 Orang	100 %	526.203.200,00	609.320.848,00	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								182.250.680,00	162.203.105,00
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								182.250.680,00	162.203.105,00
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota									
					Percentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan AC dalam kondisi baik	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Percentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	966 Makam	100 %	182.250.680,00	162.203.105,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								3.614.326.003,00	3.113.440.803,00
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								3.614.326.003,00	3.113.440.803,00
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								1.851.965.900,00	1.636.275.500,00
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								121.013.500,00	121.013.500,00
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG									
					Percentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase program yang di ARG	- Kota Madiun, Taman, Pandean	100 %	34 Dokumen	100 %	55.940.500,00	55.940.500,00	
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota								46.525.000,00	46.525.000,00
					Percentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase program yang di ARG	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	34 Dokumen	100 %			
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG									
					Percentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase program yang di ARG	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	34 Perangkat Daerah	100 %	9.635.000,00	9.635.000,00	
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG									

					Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program yang di ARG	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	34 Perangkat Daerah	100 %	8.913.000,00	8.913.000,00		
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota							91.476.000,00	91.476.000,00		
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	1 Dokumen	32,5 %	34.946.000,00	34.946.000,00	
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	30 Organisasi	32,5 %	56.530.000,00	56.530.000,00	
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								1.639.476.400,00	1.423.786.000,00	
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	580 Orang	60 %	1.482.635.300,00	1.266.944.900,00	
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	1 Dokumen	60 %	156.841.100,00	156.841.100,00	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								402.159.225,00	402.159.225,00	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								205.868.335,00	205.868.335,00	
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	1 Dokumen	100 %	56.777.490,00	56.777.490,00	
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	- Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	100 %	34 Perangkat Daerah	100 %	149.090.845,00	149.090.845,00	
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota								174.426.250,00	174.426.250,00	
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyedia layanan yang melaksanakan rujukan lanjutan	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	20 Layanan	95 %	174.426.250,00	174.426.250,00	
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								21.864.640,00	21.864.640,00	
2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota										

					Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	12 Orang	100 %	12.421.995,00	12.421.995,00		
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	1 Dokumen	100 %	9.442.645,00	9.442.645,00	
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						422.862.500,00	370.890.700,00	
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							294.593.000,00	242.621.200,00	
2	08	04	2.01	01	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	- Kota Madiun, Taman, Taman	30 %	3 Perangkat Daerah	100 %	107.363.000,00	101.415.200,00	
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	- Kota Madiun, Taman, Taman	30 %	1 Dokumen	100 %	187.230.000,00	141.206.000,00	
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							128.269.500,00	128.269.500,00	
2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang aktif dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 %	150 Orang	100 %	128.269.500,00	128.269.500,00	
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							188.089.700,00	172.929.700,00	
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota							188.089.700,00	172.929.700,00	
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Data terpilih gender dan anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase pengumpulan data gender dan anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	101.469.000,00	96.059.000,00	
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Data terpilih gender dan anak	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengumpulan data gender dan anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	86.620.700,00	76.870.700,00	
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							656.513.000,00	438.450.000,00	
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42,20 %	1 Dokumen	38 %	64.200.000,00	64.200.000,00
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42,20 %	100 Orang	27 %	24.250.000,00	24.250.000,00
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42,20 %	1 Dokumen	27 %	291.000.000,00	130.000.000,00	

2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
					Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42,20 %	1 Dokumen	27 %	232.063.000,00	175.000.000,00	
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
					Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42,20 %	1 Dokumen	27 %	45.000.000,00	45.000.000,00	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								92.735.678,00	92.735.678,00
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								28.235.700,00	28.235.700,00
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									
					Persentase kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sekolah yang terlibat dalam perlindungan Anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,04 %	1 Dokumen	69,50 %	28.235.700,00	28.235.700,00	
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								41.749.118,00	41.749.118,00
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota									
					Persentase kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,04 %	12 Layanan	100 %	10.350.000,00	10.350.000,00	
2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota									
					Persentase kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,04 %	1 Dokumen	100 %	31.399.118,00	31.399.118,00	
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								22.750.860,00	22.750.860,00
2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
					Persentase kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang terlibat dalam perlindungan Khusus Anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,04 %	1 Dokumen	100 %	22.750.860,00	22.750.860,00	
												TOTAL	39.012.529.406,00	34.983.542.906,00

Berdasarkan tabel hasil analisis kebutuhan Perangkat Daerah ditemukan perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD yaitu :

1. Kegiatan Lomba Karang Werdha

Karang Werda merupakan organisasi kemasyarakatan yang belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Karang Werda merupakan wadah pembinaan dan pemberdayaan Lansia. Lansia adalah bagian dari masyarakat yang berhubungan sangat erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat. Wujud dari usaha pemerintah dalam memberdayakan para lansia adalah pemberdayaan lansia melalui beberapa kegiatan yang salah satunya adalah lomba karang werda antar Kelurahan untuk mendorong serta meningkatkan aktivitas lansia sehingga para Lansia semakin mampu mengembangkan diri dalam hal sosial, ekonomi, dan budaya.

2. Kota Layak Anak

bagi anak harus memperoleh pengutamaan, dan setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan maupun kepedulian dari kekerasan dan diskriminasi sehingga untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya dari Pemerintah Kota Madiun, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan kota layak anak yang dilakukan melalui beberapa kegiatan. Di dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah in berdasarkan hasil analisis, perlu ditambahkan kegiatan-kegiatan yang selama ini belum dilaksanakan untuk dapat mempercepat pemenuhan hak anak di Kota Madiun

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam upaya untuk mengakomodir usulan masyarakat maka diperlukan sumber pendanaan selain APBD Kota Madiun, yaitu APBD Provinsi maupun APBN. Usulan-usulan masyarakat yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi dan atau APBN harus disertai data dukung dan telah di verifikasi oleh Perangkat Daerah terkait.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang masuk pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Masyarakat semuanya permintaan Bantuan Sosial baik dalam bentuk tunai maupun barang berupa alat bantu untuk disabilitas. Usulan tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan Panduan Teknis

Pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan dan Kecamatan pada Tahun 2023 untuk 2024 yang menyatakan bahwa warga yang diusulkan mendapatkan Bantuan Sosial harus sudah masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

**Usulan Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024**

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Pagu Indikatif (Rp.)												
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Hasil (Sasaran)	Target Capaian Kinerja			Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan (Sasaran)										
1	6		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																					
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												9.914.460.444									
1	6	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												528.383.950								
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	100%	4 Dokumen	23	129.757.550										
1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	100%	16 Laporan	23	24.684.200										
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	100%	2 Laporan	23	373.942.200										
1	6	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												6.380.293.089								
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	100%	35 Orang	23	6.234.914.489										
1	6	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	100%	13 Laporan	23	145.378.600										
1	6	1	2.05	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah												100.439.400								
1	6	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	100%	59 Orang	23	54.892.600										
1	6	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	100%	60 Orang	23	45.546.800										
1	6	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												475.630.000								
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen administrasi umum	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	100%	142 Laporan	23	475.630.000										
1	6	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												583.685.880								
1	6	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur pemerintah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	100%	40 Unit	23	100.800.000										
1	6	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur pemerintah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	100%	1 Unit	23	383.890.810										
1	6	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur pemerintah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	100%	40 Unit	23	98.995.070										
1	6	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												1.339.057.830								

1	6	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	100%	24 Laporan	23	1.023.757.830
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	100%	12 Laporan	23	315.300.000
1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									506.970.295
1	6	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	100%	25 Unit	23	233.514.500
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	100%	2 Unit	23	182.421.075
1	6	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	100%	110 Unit	23	91.034.720
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL									4.561.962.150
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota									4.561.962.150
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang dibina	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang diberdayakan	66%	66%	214 Orang	92%	766.785.700
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang dibina	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang diberdayakan	66%	66%	3 Orang	92%	59.878.400
1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang dibina	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang diberdayakan	66%	66%	5 Keluarga	92%	420.856.400
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang dibina	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang diberdayakan	66%	66%	14 Lembaga	92%	3.314.441.650
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									5.039.749.864
1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial									4.377.960.541
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100%	100%	170 Orang	21%	210.640.000
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten/kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100%	100%	63 Orang	21%	25.768.681
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100%	100%	15 Orang	21%	59.692.000
1	6	4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100%	100%	13 Orang	21%	42.300.000

1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial								
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial kewenangan kabupaten/kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100%	100%	65 Orang	21%	20.600.000	
1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Jumlah peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100%	100%	280 Orang	21%	3.709.472.860	
1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial									661.789.323	
1	6	4	2.02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100%	100%	35 Orang	21%	253.589.605	
1	6	4	2.02	3	Penyediaan Permakanan	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan penuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100%	100%	260 Orang	21%	145.587.500	
1	6	4	2.02	4	Penyediaan Sandang	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten/kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100%	100%	60 Orang	21%	51.700.717	
1	6	4	2.02	5	Penyediaan Alat Bantu	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100%	100%	21 Orang	21%	20.268.500	
1	6	4	2.02	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Jumlah orang yang mendapatkan penuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di luar panti kewenangan kabupaten/kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100%	100%	110 Orang	21%	29.426.001	
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial kewenangan kabupaten/kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100%	100%	135 Orang	21%	14.100.000	
1	6	4	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100%	100%	80 Orang	21%	118.917.000	
1	6	4	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100%	100%	20 Orang	21%	28.200.000	
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL									14.912.918.900	
1	6	5	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar									8.668.000	
1	6	5	2.01	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	91%	95%	15 Orang	95%	3.960.000	

1	6	5	2.01	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Percentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	91%	95%	8 Orang	95%	4.488.000
1	6	5	2.01	3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Percentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	91%	95%	8 Orang	95%	220.000
1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									14.904.250.900
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Percentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	91%	100%	24685 Orang	95%	1.182.942.800
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Percentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	91%	100%	4000 Keluarga	95%	645.005.500
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Percentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	91%	100%	4000 Orang	95%	12.733.026.000
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Percentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	91%	100%	56 Orang	95%	343.276.600
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA									786.861.365
1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota									79.870.965
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Percentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Percentase Korban bencana yang mendapat bantuan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pernakalan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	300 Orang	95%	39.293.665
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Percentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Percentase Korban bencana yang mendapat bantuan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	300 Orang	95%	15.177.300
1	6	6	2.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Percentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Percentase Korban bencana yang mendapat bantuan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	15 Orang	95%	25.400.000
1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota									706.990.400
1	6	6	2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Percentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Percentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	1 Kampung	95%	180.787.200
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Percentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Percentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	30 Orang	95%	526.203.200
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN									182.250.680
1	6	7	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota									182.250.680
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Percentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	Percentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	966 Makam	95%	182.250.680
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									1.851.965.900
2	8	2	2.01		Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota									121.013.500
2	8	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Percentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Percentase program yang di ARG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan	100%	100%	32 Dokumen	100%	55.940.500

2	8	2	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Percentase program yang di ARG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan	100%	100%	34 Dokumen	100%	46.525.000
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Percentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Percentase program yang di ARG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Tersmasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan	100%	100%	34 Perangkat Daerah	100%	9.635.000
2	8	2	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Percentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Percentase program yang di ARG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Tersmasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan	100%	100%	34 Perangkat Daerah	100%	8.913.000
2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota									91.476.000
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Percentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Percentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan	100%	32,50%	8 Dokumen	100%	34.946.000
2	8	2	2	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Percentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Percentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan	100%	32,50%	80 organisasi	100%	56.530.000
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									1.639.476.400
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Percentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Percentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan	100%	60%	580 Orang	100%	1.482.635.300
2	8	2	2.03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Percentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Percentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan	100%	60%	1 Dokumen	100%	156.841.100
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									402.159.225
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									205.868.335
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Percentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	100%	100%	1 Dokumen	100%	56.777.490
2	8	3	2.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Percentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	100%	100%	27 Perangkat Daerah	100%	149.090.845
2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota									174.426.250
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	Percentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Percentase penyedia layanan yang melaksanakan rujukan lanjutan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi	Percentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	100%	95%	20 Layanan	100%	174.426.250

				Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota							
2	8	3	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										21.864.640
2	8	3	2.03	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	100%	100%	12 Orang	100%	12.421.995
2	8	3	2.03	4	Penguanan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Penguanan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	100%	100%	1 Dokumen	100%	9.442.645
2	8	4		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA										422.862.500
2	8	4	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										294.593.000
2	8	4	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	Persentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang berkualitas	30%	100%	34 Perangkat Daerah	15%	107.363.000
2	8	4	2.01	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	Persentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase keluarga yang berkualitas	30%	100%	1 Dokumen	15%	187.230.000
2	8	4	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota										128.269.500
2	8	4	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	Persentase lembaga yang aktif dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak anak	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang berkualitas	30%	100%	257 Orang	15%	128.269.500
2	8	5		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK										188.089.700
2	8	5	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										188.089.700
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Data terpilih gender dan anak	Persentase pengumpulan data gender dan anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%	101.469.000
2	8	5	2.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Data terpilih gender dan anak	Persentase pengumpulan data gender dan anak	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%	86.620.700
2	8	6		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)										656.513.000
2	8	6	2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota										64.200.000
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi Kekerasan terhadap anak	42,20%	38%	1 Dokumen	0,002	64.200.000
2	8	6	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										592.313.000
2	8	6	2.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi Kekerasan terhadap anak	42,20%	27%	100 Orang	0,002	24.250.000
2	8	6	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi Kekerasan terhadap anak	42,20%	27%	1 Dokumen	0,002	291.000.000
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi Kekerasan terhadap anak	42,20%	27%	1 Dokumen	0,002	232.063.000

2	8	6	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi Kekerasan terhadap anak	42,20%	27%	1 Dokumen	0,002	45.000.000	
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									92.735.678	
2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									28.235.700	
2	8	7	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Sekolah yang terlibat dalam perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	0,04%	69,50%	1 Dokumen	100%	28.235.700	
2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									41.749.118	
2	8	7	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	Persentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	0,04%	100%	12 Layanan	100%	10.350.000	
2	8	7	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	Persentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	0,04%	100%	1 Dokumen	100%	31.399.118	
2	8	7	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									22.750.860	
2	8	7	2.03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Lembaga yang terlibat dalam perlindungan Khusus Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	0,04%	100%	1 Dokumen	100%	22.750.860	
														TOTAL	39.012.529.406

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung tersangkut dan mendukung arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional meliputi :

1. Kemiskinan ekstrem
2. Ketimpangan wilayah
3. Reformasi Birokrasi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Madiun Yaitu :

1. Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS dengan indikator Persentase PMKS yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar minimal target 94% ; dan
2. terwujudnya pemenuhan dan perlindungan hak anak serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan dengan indikator Rasio Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) target 77,22.

Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Madiun Yaitu :

1. meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial PMKS dengan indikator Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial target 95% ;
2. meningkatnya pemberdayaan sosial PSKS dengan indikator Persentase PSKS yang diberdayakan target 92% ;
3. meningkatnya rehabilitasi sosial PMKS dengan indikator Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial target 100% ;
4. meningkatnya tata kelola pengarusutamaan gender terdapat 2 (dua) indikator yaitu :
 - b. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan dengan target 25,01%;
 - c. persentase keluarga yang berkualitas target 80% ;

5. meningkatnya penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dengan indikator Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan target 100% ;
6. meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak anak dengan indikator Prevalensi kekerasan terhadap anak target 0,002 ;
7. Indeks Reformasi Birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Target 24 ;

Program dan Kegiatan Mendukung Pencapaian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2024

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Visi Misi	SDG's	SPM	Kemiskinan	Faktor Lain
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	✓			✓	
A	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	✓			✓	
1	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	✓			✓	
2	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	✓			✓	
3	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	✓			✓	
4	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	✓			✓	
II	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	✓	✓	✓	✓	
A	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	✓	✓	✓	✓	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	✓	✓	✓	✓	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	✓	✓	✓	✓	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	✓	✓	✓	✓	
4	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	✓	✓	✓	✓	
5	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	✓	✓	✓	✓	
6	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	
7	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	✓	✓	✓	✓	
B	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	✓	✓	✓	✓	
1	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	✓	✓	✓	✓	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	✓	✓	✓	✓	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	✓	✓	✓	✓	
4	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	✓	✓	✓	✓	
5	Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	✓	✓	✓	✓	
6	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	✓	✓	✓	✓	
7	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	✓	✓	✓	✓	
8	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	✓	✓	✓	✓	
III	PROGRAM PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	✓	✓		✓	
A	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	✓	✓		✓	
1	Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	✓	✓		✓	
2	Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar	✓	✓		✓	
3	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	✓	✓		✓	
B	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓		✓	
1	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓		✓	

2	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓		✓	
3	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	✓	✓		✓	
4	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	✓	✓		✓	
IV	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	✓		✓		
A	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	✓		✓		
1	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	✓		✓		
2	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	✓		✓		
3	Sub Kegiatan Pelayanan dukungan Psikososial	✓		✓		
B	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	✓		✓		
1	Sub Kegiatan Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	✓		✓		
2	Sub Kegiatan Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Pembinaan Taruna Siaga Bencana	✓		✓		
V	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	✓				✓
A	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	✓				✓
1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	✓				✓
VI	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	✓	✓			
A	Kegiatan Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	✓	✓			
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	✓	✓			
2	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	✓	✓			
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	✓	✓			
4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	✓	✓			
B	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	✓	✓			
1	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	✓	✓			
C	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	✓	✓			
1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	✓	✓			
2	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	✓	✓			
VII	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	✓	✓			
A	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓			
1	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	✓	✓			
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	✓	✓			
B	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓			

1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓			
C	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓			
VIII	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	✓	✓			
A	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓			
1	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	✓	✓			
2	Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	✓	✓			
IX	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	✓	✓			
A	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓			
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota	✓	✓			
2	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	✓	✓			
B	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	✓	✓			
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	✓	✓			
C	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓			
1	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik Bagi Perempuan Dalam Situasi Darurat Dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	✓	✓			
2	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	✓	✓			
X	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	✓	✓			
A	Kegiatan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	✓	✓			
1	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak anak Kewenangan Kabupaten/Kota	✓	✓			
B	Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	✓	✓			
1	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	✓	✓			
2	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓			
3	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi ,Informasi Dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓			
4	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓			

XI	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	✓	✓			
A	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓			
1	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	✓	✓			
B	Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	✓	✓			
1	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	✓	✓			
2	Sub Kegiatan Penguanan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	✓	✓			
C	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedian Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah kabupaten / Kota	✓	✓			
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Penguanan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓			
XII	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	✓				
A	Kegiatan Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	✓				
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	✓				
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	✓				
3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	✓				
B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	✓				
1	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	✓				
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	✓				
C	Kegiatan Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah	✓				
1	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	✓				
2	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	✓				
D	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	✓				
	Sub Kegiatan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	✓				
E	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	✓				
1	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	✓				
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	✓				
3	Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	✓				
F	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	✓				
1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	✓				
2	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	✓				
G	Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	✓				

1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	✓				
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	✓				
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	✓				

Dari hasil identifikasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang diampu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, maka pada Tahun 2024 usulan yang diajukan dalam Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. jumlah usulan
 - a. Program : 12 Program
 - b. Kegiatan : 29 Kegiatan
 - c. Sub Kegiatan : 74 Sub Kegiatan
 - d. Pagu Anggaran : Rp. 34.983.542.906,00
 - e. Sumber Pendanaan :
 - 1) APBD : Rp. 34.983.542.906,00
 - 2) APBD PROV : Rp. -
 - 3) APBN : Rp. -
 - 4) Lainnya : Rp. -
2. Lokasi Kegiatan : Kota Madiun

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								34.862.529.406,00				42.913.772.350,00	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								31.749.088.603,00				38.938.023.745,00	
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								31.749.088.603,00				38.938.023.745,00	
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								8.625.032.816,00				10.905.906.489,00	
1	06	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							266.283.950,00				581.222.345,00	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
				Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A nilai	4 Dokumen	100 %	129.757.550,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	142.733.305,00
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
				Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A nilai	4 Laporan	100 %	24.684.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	27.152.620,00
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
				Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A nilai	2 Laporan	100 %	111.842.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	411.336.420,00
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5.979.126.761,00				7.018.322.398,00
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
				Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan daerah	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A Nilai	35 Orang/bulan	100 %	5.833.748.161,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	6.858.405.938,00
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD											
				Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan		Persentase pemenuhan dokumen administrasi	- Kota Madiun, Semua Kecamatan,	A Nilai	13 Laporan	100 %	145.378.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	13 Laporan	159.916.460,00

					Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	keuangan daerah	Semua Kel/Desa						Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						98.278.000,00				110.483.340,00	
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
					Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pegawai yang mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	- Kota Madiun, Taman, Taman	A Nilai	58 Orang	100 %	54.376.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang	60.381.860,00
1	06	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
					Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pegawai yang mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	- Kota Madiun, Taman, Taman	A Nilai	58 Orang	100 %	43.902.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	58 Orang	50.101.480,00
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						475.630.000,00				523.193.000,00	
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
					Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan dokumen administrasi umum	- Kota Madiun, Taman, Taman	A Nilai	60 Laporan	100 %	475.630.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	523.193.000,00
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100.095.070,00				642.054.468,00	
1	06	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
					Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase tercukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur pemerintah	- Kota Madiun, Taman, Taman	A Nilai	0 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	110.880.000,00
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
					Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase tercukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur pemerintah	- Kota Madiun, Taman, Taman	A Nilai	0 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	422.279.891,00
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							100.095.070,00				
					Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase tercukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur pemerintah	- Kota Madiun, Taman, Taman	A Nilai	110 Unit	100 %	100.095.070,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	110 Unit	108.894.577,00
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.198.648.740,00				1.472.963.613,00	
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
					Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	- Kota Madiun, Taman, Taman	A Nilai	12 Laporan	100 %	883.348.740,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.126.133.613,00
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

					Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	- Kota Madiun, Taman, Taman	A Nilai	12 Laporan	100 %	315.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	346.830.000,00
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							506.970.295,00					557.667.325,00
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
					Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	- Kota Madiun, Taman, Taman	A Nilai	6 Unit	100 %	233.514.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	256.865.950,00
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	- Kota Madiun, Taman, Taman	A Nilai	2 Unit	100 %	182.421.075,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.663.183,00
1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
					Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	- Kota Madiun, Taman, Taman	A Nilai	110 Unit	100 %	91.034.720,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	110 Unit	100.138.192,00
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							4.351.382.713,00					5.018.158.365,00
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							4.351.382.713,00					5.018.158.365,00
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Percentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase PSKS yang dibina	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66 %	214 Orang	66 %	682.439.273,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	214 Orang	843.464.270,00
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Percentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase PSKS yang dibina	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66 %	3 Orang	66 %	53.291.776,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	65.866.240,00
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Percentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase PSKS yang dibina	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66 %	5 Keluarga	66 %	370.112.196,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Keluarga	462.942.040,00
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Percentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase PSKS yang dibina	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66 %	14 Lembaga	66 %	3.245.539.468,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Lembaga	3.645.885.815,00
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							4.534.633.481,00					5.543.724.851,00
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							3.944.103.151,00					4.815.756.595,00
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan												

					Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	170 Orang	100 %	170.896.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	170 Orang	231.704.000,00
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang												
					Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	63 Orang	100 %	15.332.431,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	63 Orang	28.345.549,00
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu												
					Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	8 Orang	100 %	26.308.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	65.661.200,00
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga												
					Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	8 Orang	100 %	22.560.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	46.530.000,00
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial												
					Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	30 Orang	100 %	9.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	22.660.000,00

						Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial											
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	280 Orang	100 %	3.627.186.820,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Orang	4.080.420.146,00	
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Orang	100 %	72.319.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	340.435.700,00
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								590.530.330,00				727.968.256,00
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	35 Orang	100 %	209.180.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	278.948.566,00
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	160 Orang	100 %	86.366.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	160.146.250,00
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang												

					Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	105 Orang	100 %	42.790.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	105 Orang	56.870.789,00
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu												
					Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Orang	100 %	20.242.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	22.295.350,00
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti												
					Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	85 Orang	100 %	25.311.830,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	32.368.601,00
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial												
					Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	160 Orang	100 %	73.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	15.510.000,00
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar												
					Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	75 Orang	100 %	121.560.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	130.808.700,00
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga												

					Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	15 Orang	100 %	11.280.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	31.020.000,00
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							13.234.529.873,00					16.404.210.790,00
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar							7.714.520,00					9.534.800,00
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar												
					Persentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 91 %	8 Orang	95 %	3.524.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	4.356.000,00
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar												
					Persentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 91 %	4 Orang	95 %	3.994.320,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	4.936.800,00
1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar												
					Persentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 91 %	4 Orang	95 %	195.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	242.000,00
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							13.226.815.353,00					16.394.675.990,00
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota												
					Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91 %	24685 Orang	100 %	1.052.819.092,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	24685 Orang	1.301.237.080,00
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota												

					Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91 %	4000 Keluarga	100 %	574.054.895,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	4000 Keluarga	709.506.050,00	
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga													
					Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91 %	4000 Keluarga	100 %	11.294.425.192,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4000 Keluarga	14.006.328.600,00	
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat													
					Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91 %	40 Orang	100 %	305.516.174,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	377.604.260,00	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA								841.306.615,00					865.547.502,00
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								71.085.159,00					87.858.062,00
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan													
					Prosentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsi) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	17 Orang	100 %	34.971.362,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsi) Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	43.223.032,00	
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang													
					Prosentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsi) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	17 Orang	100 %	13.507.797,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsi) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	16.695.030,00	
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial													
					Prosentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	17 Orang	100 %	22.606.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	27.940.000,00	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								770.221.456,00					777.689.440,00
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana													
					Prosentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Kampung	100 %	160.900.608,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	198.865.920,00	

1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana												
					Percentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	26 Orang	100 %	609.320.848,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	578.823.520,00
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN									162.203.105,00			200.475.748,00
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota									162.203.105,00			200.475.748,00
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota												
					Percentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan AC dalam kondisi baik	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Percentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	966 Makam	100 %	162.203.105,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	966 Makam	200.475.748,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									3.113.440.803,00			3.975.748.605,00
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									3.113.440.803,00			3.975.748.605,00
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									1.636.275.500,00			2.037.162.490,00
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota									121.013.500,00			133.114.850,00
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG												
					Percentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase program yang di ARG	- Kota Madiun, Taman, Pandean	100 %	34 Dokumen	100 %	55.940.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Dokumen	61.534.550,00
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Percentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase program yang di ARG	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	34 Dokumen	100 %	46.525.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Dokumen	51.177.500,00
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG												
					Percentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase program yang di ARG	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	34 Perangkat Daerah	100 %	9.635.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	10.598.500,00
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG												
					Percentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase program yang di ARG	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	34 Perangkat Daerah	100 %	8.913.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	9.804.300,00
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota									91.476.000,00			100.623.600,00
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi												

					Percentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	1 Dokumen	32,5 %	34.946.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	38.440.600,00
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi												
					Percentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	30 Organisasi	32,5 %	56.530.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi	62.183.000,00
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota												1.803.424.040,00
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Percentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Percentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	580 Orang	60 %	1.266.944.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	580 Orang	1.630.898.830,00
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Percentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Percentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	1 Dokumen	60 %	156.841.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	172.525.210,00
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN												442.365.149,00
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota												226.445.169,00
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota												
					Percentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	1 Dokumen	100 %	56.777.490,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	62.445.239,00
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Percentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan	- Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	100 %	34 Perangkat Daerah	100 %	149.090.845,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	163.999.930,00

						terhadap Perempuan												
2	08	03	2.02			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota										191.868.875,00		
2	08	03	2.02	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota												
						Percentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase penyedia layanan yang melaksanakan rujukan lanjutan	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	20 Layanan	95 %	174.426.250,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Layanan	191.868.875,00
2	08	03	2.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								21.864.640,00				24.051.105,00
2	08	03	2.03	03		Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota												
						Percentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Percentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	12 Orang	100 %	12.421.995,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	12 Orang	13.664.195,00
2	08	03	2.03	04		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota												
						Percentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	1 Dokumen	100 %	9.442.645,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.386.910,00
2	08	04				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								370.890.700,00				465.148.750,00
2	08	04	2.01			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								242.621.200,00				324.052.300,00
2	08	04	2.01	01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												
						Percentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	- Kota Madiun, Taman, Taman	30 %	3 Perangkat Daerah	100 %	101.415.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat Daerah	118.099.300,00
2	08	04	2.01	02		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota												
						Percentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Percentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	- Kota Madiun, Taman, Taman	30 %	1 Dokumen	100 %	141.206.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	205.953.000,00
2	08	04	2.02			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								128.269.500,00				141.096.450,00
2	08	04	2.02	02		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
						Percentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase lembaga yang aktif dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 %	150 Orang	100 %	128.269.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	141.096.450,00
2	08	05				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								172.929.700,00				206.898.670,00
2	08	05	2.01			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								172.929.700,00				206.898.670,00
2	08	05	2.01	01		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota												
						Terpenuhinya Data terpilih gender dan anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Percentase pengumpulan data gender dan anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	96.059.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	111.615.900,00

2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Terpenuhinya Data terpilih gender dan anak	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengumpulan data gender dan anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	76.870.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	95.282.770,00
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							438.450.000,00					722.164.300,00
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							64.200.000,00					70.620.000,00
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka pemuhan hak anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42,20 %	1 Dokumen	38 %	64.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	70.620.000,00
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							374.250.000,00					651.544.300,00
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42,20 %	100 Orang	27 %	24.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	26.675.000,00
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
					Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42,20 %	1 Dokumen	27 %	130.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	320.100.000,00
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
					Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42,20 %	1 Dokumen	27 %	175.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	255.269.300,00
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
					Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42,20 %	1 Dokumen	27 %	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	49.500.000,00
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							92.735.678,00					102.009.246,00
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							28.235.700,00					31.059.270,00
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Persentase kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sekolah yang terlibat dalam perlindungan Anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan,	0,04 %	1 Dokumen	69,50 %	28.235.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	31.059.270,00

2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											45.924.030,00	
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Percentase kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0.04 %	12 Layanan	100 %	10.350.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Layanan	11.385.000,00
2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Percentase kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0.04 %	1 Dokumen	100 %	31.399.118,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	34.539.030,00
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											25.025.946,00	
2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
					Percentase kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Lembaga yang terlibat dalam perlindungan Khusus Anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0.04 %	1 Dokumen	100 %	22.750.860,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.025.946,00
TOTAL										34.983.542.906,00						43.046.887.200,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Prioritas Pemerintah Daerah pada Tahun 2024 yang harus didukung dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah :

1. Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City ;
2. Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat ;
3. Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusifitas Sosial ; dan
4. Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									34.862.529.406,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									31.749.088.603,00		
1 06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									31.749.088.603,00		
1 06 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									8.625.032.816,00		
1 06 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									266.283.950,00		
1 06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
			Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A nilai	4 Dokumen	100 %	129.757.550,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
1 06 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
			Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A nilai	4 Laporan	100 %	24.684.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
1 06 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
			Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A nilai	2 Laporan	100 %	111.842.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										5.979.126.761,00		
1 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
			Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan daerah	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A Nilai	35 Orang/bulan	100 %	5.833.748.161,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
1 06 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD												
			Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan daerah	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A Nilai	13 Laporan	100 %	145.378.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
1 06 01 2.05	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah										98.278.000,00		
1 06 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
			Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pegawai yang mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	- Kota Madiun, Taman, Taman	A Nilai	58 Orang	100 %	54.376.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
1 06 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												
			Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pegawai yang mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	- Kota Madiun, Taman, Taman	A Nilai	58 Orang	100 %	43.902.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										475.630.000,00		
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan dokumen administrasi umum	- Kota Madiun, Taman, Taman	A Nilai	60 Laporan	100 %	475.630.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										100.095.070,00		
1 06 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
			Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase tercukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur pemerintah	- Kota Madiun, Taman, Taman	A Nilai	0 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		

					Percentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	63 Orang	100 %	15.332.431,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu									
					Percentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	8 Orang	100 %	26.308.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga									
					Percentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	8 Orang	100 %	22.560.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial									
					Percentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	30 Orang	100 %	9.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat									
					Percentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	280 Orang	100 %	3.627.186.820,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan									
					Percentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Orang	100 %	72.319.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								590.530.330,00	
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan									
					Percentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	35 Orang	100 %	209.180.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan									
					Percentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	160 Orang	100 %	86.366.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang									
					Percentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	105 Orang	100 %	42.790.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu									
					Percentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Orang	100 %	20.242.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti									
					Percentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	85 Orang	100 %	25.311.830,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial									

					Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	160 Orang	100 %	73.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar									
					Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	75 Orang	100 %	121.560.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga									
					Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	15 Orang	100 %	11.280.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								13.234.529.873,00	
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar								7.714.520,00	
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar									
					Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 91 %	8 Orang	95 %	3.524.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar									
					Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 91 %	4 Orang	95 %	3.994.320,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar									
					Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 91 %	4 Orang	95 %	195.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								13.226.815.353,00	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
					Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91 %	24685 Orang	100 %	1.052.819.092,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
					Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91 %	4000 Keluarga	100 %	574.054.895,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga									
					Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91 %	4000 Keluarga	100 %	11.294.425.192,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat									
					Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91 %	40 Orang	100 %	305.516.174,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA								841.306.615,00	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								71.085.159,00	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan									
					Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakaman 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	17 Orang	100 %	34.971.362,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang									

					Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakai dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsi) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	17 Orang	100 %	13.507.797,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial									
					Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	17 Orang	100 %	22.606.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								770.221.456,00	
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana									
					Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Kampung	100 %	160.900.608,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana									
					Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	26 Orang	100 %	609.320.848,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								162.203.105,00	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								162.203.105,00	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota									
					Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan AC dalam kondisi baik	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	966 Makam	100 %	162.203.105,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								3.113.440.803,00	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								3.113.440.803,00	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								1.636.275.500,00	
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								121.013.500,00	
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG									
					Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program yang di ARG	- Kota Madiun, Taman, Pandean	100 %	34 Dokumen	100 %	55.940.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota									
					Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program yang di ARG	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	34 Dokumen	100 %	46.525.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG									
					Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program yang di ARG	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	34 Perangkat Daerah	100 %	9.635.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG									
					Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program yang di ARG	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	34 Perangkat Daerah	100 %	8.913.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota								91.476.000,00	
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi									
					Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	1 Dokumen	32,5 %	34.946.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi									

					Percentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	30 Organisasi	32,5 %	56.530.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							1.423.786.000,00			
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Percentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	580 Orang	60 %	1.266.944.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Percentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	1 Dokumen	60 %	156.841.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								402.159.225,00		
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								205.868.335,00		
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	1 Dokumen	100 %	56.777.490,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	- Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	100 %	34 Perangkat Daerah	100 %	149.090.845,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota								174.426.250,00		
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase penyedia layanan yang melaksanakan rujukan lanjutan	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	20 Layanan	95 %	174.426.250,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								21.864.640,00		
2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Percentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	12 Orang	100 %	12.421.995,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	- Kota Madiun, Taman, Taman	100 %	1 Dokumen	100 %	9.442.645,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								370.890.700,00		
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								242.621.200,00		
2	08	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	- Kota Madiun, Taman, Taman	30 %	3 Perangkat Daerah	100 %	101.415.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Percentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	- Kota Madiun, Taman, Taman	30 %	1 Dokumen	100 %	141.206.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								128.269.500,00		
2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										

					Percentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase lembaga yang aktif dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 %	150 Orang	100 %	128.269.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							172.929.700,00		
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							172.929.700,00		
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Data terpilih gender dan anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Percentase pengumpulan data gender dan anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	96.059.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Data terpilih gender dan anak	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase pengumpulan data gender dan anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	76.870.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							438.450.000,00		
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							64.200.000,00		
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42,20 %	1 Dokumen	38 %	64.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							374.250.000,00		
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42,20 %	100 Orang	27 %	24.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42,20 %	1 Dokumen	27 %	130.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42,20 %	1 Dokumen	27 %	175.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42,20 %	1 Dokumen	27 %	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							92.735.678,00		
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							28.235.700,00		
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Sekolah yang terlibat dalam perlindungan Anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,04 %	1 Dokumen	69,50 %	28.235.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							41.749.118,00		
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,04 %	12 Layanan	100 %	10.350.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota									

					Percentase kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0.04 %	1 Dokumen	100 %	31.399.118,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							22.750.860,00	
2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
					Percentase kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Lembaga yang terlibat dalam perlindungan Khusus Anak	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0.04 %	1 Dokumen	100 %	22.750.860,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
												TOTAL	34.983.542.906,00

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun telah dilakukan pembahasan dan analisis kebutuhan dan memperhatikan isu-isu penting terkait pelayanan Perangkat Daerah. Forum Renja Perangkat Daerah juga mengakomodir usulan masyarakat melalui Musyawarah Pembangunan bersama stakeholder terkait, usulan Pokok Pikiran DPRD, usulan Top Down, serta yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

Berdasarkan kinerja tahun sebelumnya, arahan prioritas pembangunan dan Rencana Strategis, maka tujuan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2024 adalah :

1. terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar PMKS dengan indikator Persentase PMKS yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar minimal ; dan
2. terwujudnya pemenuhan dan perlindungan hak anak serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Berdasarkan Tujuan, maka sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2024 adalah :

8. meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial PMKS dengan indikator Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial ;
9. meningkatnya pemberdayaan sosial PSKS dengan indikator Persentase PSKS yang diberdayakan ;
10. meningkatnya rehabilitasi sosial PMKS dengan indikator Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial ;
11. meningkatnya tata kelola pengarusutamaan gender ;
12. meningkatnya penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan ;
13. meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak anak ; dan
14. Indeks Reformasi Birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun disusun sebagai dokumen pendukung dan penyelarasan dokumen perencanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2024.

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA MADIUN,



HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19720505 199101 1 002